



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.2.656443/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;

- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- n. Melakukan monitoring Laporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- o. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- p. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Inspektorat KPU RI;
- q. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- r. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- s. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- t. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- u. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- v. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- w. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan dari satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- x. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Inspektorat KPU RI;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab:

- a. Membantu satuan kerja dalam melaksanakan penilaian PIPK pada Periode pelaporan semesteran dan tahunan;
- b. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian;
- c. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Merekendasikan kepada satuan kerja ruang Lingkup laporan keuangan yang akan dinilai pengendalian internnya termasuk pemilihan akun-akun signifikan;
- e. Mempertimbangkan tingkat materialitas resiko kesalahan atau salah saji yang dapat terjadi dalam laporan keuangan yang akan berpengaruh terhadap keputusan atau kesimpulan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun;
- f. Mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan pada akun signifikan, yaitu:
 - 1) Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubung dengan apakah aset, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca;
 - 2) Asersi kelengkapan yang menyatakan bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan seluruhnya;

- 3) Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah pada tanggal tertentu, aset yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban entitas;
 - 4) Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah nilai-nilai yang tersaji pada akun aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan merupakan nilai-nilai yang tepat;
 - 5) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah berbagai komponen dalam laporan keuangan telah digabungkan atau dipisahkan, diuraikan, dan diungkapkan dengan tepat;
- g. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan;
 - h. Melaksanakan evaluasi pengendalian intern tingkat entitas dengan Teknik:
 - 1) Reviu dokumen, dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern;
 - 2) Wawancara, dilakukan dengan mengamati secara cermat pegawai, kondisi lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaksanakan Pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi;
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai dibawahnya;
 - k. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPK;
 - l. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
 - m. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
 - n. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan PIPK;
 - o. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- p. Melakukan Verifikasi Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - q. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Perilaku dan Hukum

SEKRETARIS
Rama Sepyana



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	SUTRISNO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2	ANDREAS ARDANETA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3	NITA ZAKIA, SE	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
4	JUMIYATI	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5	RUDI KARTONO	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6	MUHAMMAD SAINI	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
7	FATIMAH	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
8	IRMA ASTUTI	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9	RETNO WULANDARI	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10	NOVI TRISIA	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11	TABRANI	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyeienggaraan



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	SUTRISNO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	RAMA SEPYANA	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KETUA
3	MUHAMMAD AMIN	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WAKIL KETUA
4	YENNI KARLINDA	KASUBBAG PARHUBMAS DAN SDM	SEKRETARIS
5	ANDREAS ARDANETA	Plt. KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6	SARWANI	STAF SUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
7	SUDARMADI	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
8	PERNANDO	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
9	RIFA NABILAH	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
10	BIMO RAFANDHA	STAF SUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

